

## Satpol PP Gelar Operasi Masker

**SUKOHARJO (KR)** - Tim gabungan melakukan operasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona dengan sasaran pemakaian masker di halaman Pemkab Sukoharjo, Jumat (28/8). Hasilnya sebanyak 22 aparat sipil negara (ASN) terjaring dan dikenai sanksi denda membayar uang tunai Rp 50.000 dan berlaku berjenjang apabila kembali kedapatan melakukan pelanggaran. Operasi serupa akan digelar petugas di semua wilayah di Sukoharjo secara bergantian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo Heru Indero, mengatakan, tim gabungan yang terlibat dalam operasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona yakni, Satpol PP, Kodim 0726, Polres, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan digelar tepat di pintu gerbang Pemkab Sukoharjo mulai pukul 07.30-08.30 WIB.

Operasi tersebut merupakan pertama kali dilakukan tim gabungan di Sukoharjo dengan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran tidak memakai masker. Hukumannya berupa membayar denda uang tunai Rp 50.000 dan berlaku berjenjang apabila kembali kedapatan melakukan pelanggaran lagi. Sanksi berikutnya berupa hukuman sosial dalam bentuk membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan, membersihkan saluran air dan lainnya. Dasar operasi protokol kesehatan dengan sasaran pemakaian masker dan memberikan sanksi denda membayar uang tunai sesuai Instruksi Presiden dan Gubernur Jawa Tengah, serta diperkuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dalam aturan itu, pelanggaran protokol kesehatan akan dijatuhi sanksi sosial hingga denda berjenjang. (Mam)-f

## Polwan Tabur Bunga untuk Pahlawan



KR-Karyono

Anggota Polwan Polda Jateng ziarah di TMP Giri Tunggal.

**SEMARANG (KR)** - Para Polwan Polda Jateng, Jumat (28/8) menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal Semarang. Ziarah dalam rangkaian Hari Jadi ke-72 Polwan tahun 2020 dipimpin Wadir Binmas Polda Jateng AKBP Siti Rondhijah SSI MKes. "Ziarah ke Makam Pahlawan merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban harta dan nyawa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," ungkap AKBP Siti Rondhijah.

Ia menyebutkan acara ziarah itu juga sebagai wujud syukur Polri khususnya polisi wanita yang dalam usianya ke-72 masih eksis dan mampu memberikan yang terbaik tidak hanya bagi kepolisian tetapi juga masyarakat bangsa, dan negara. Ziarah di TMP Giri Tunggal yang terletak di seberang Mapolda Jateng diawali dengan perhormatan kepada arwah para pahlawan. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah serta tabur bunga dilakukan seluruh peserta ziarah. (Cry)-f

## Mutasi 11 Perwira di Polres Kebumen

**KEBUMEN (KR)** - Sebanyak 11 perwira di Polres Kebumen menjalani rotasi jabatan. Salah satunya Kasat Reskrim AKP Mardi yang menduduki jabatan baru sebagai Kasat Resnarkoba Polres Demak. AKP Mardi diganti AKP Afiditya Arief Wibowo dari Poltabes Semarang. Upacara serah terima jabatan dipimpin Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan di halaman Mapolres Kebumen, Senin (24/8). Perwira lain yang mutasi, Kasat Polairud Iptu Kawan Panjaitan diserahkan ke AKP Hari Harjanto yang semula Kapolsek Kebumen. AKP Hari diganti AKP Tarjono Sapto Nugroho yang semula Kapolsek Pejagoan. Sedangkan Kapolsek Pejagoan diisi Iptu Untung Sutikno yang semula Kaurbinops Sat Intelkam Polres Kebumen.

Selain itu Kapolsek Mirit Iptu Anang Darmoko diganti Iptu Supriyo yang semula Kaurbinops Sat Samapta Polres Kebumen. Kasat Binmas yang semula dijabat AKP Yusuf diserahkan ke AKP Tamzil Mardiono yang semula Kapolsek Rowokele. Kapolsek Rowokele diisi AKP Diyono yang semula Kapolsek Klirong. Kapolsek Klirong dijabat Iptu Tugiman yang semula Kasubbag Humas Polres Kebumen, dan Iptu Sugi-yanto yang semula Kapolsek Kutowinangun menjadi Kasubbag Humas. Kapolsek Kutowinangun dijabat AKP Abu Khoiri yang semula Kapolsek Karanggayam. Jabatan Kapolsek Karanggayam diisi Iptu Kholil yang semula Kani Intel Polsek Sruweng. Berita ini sekaligus sebagai ralat atas berita sebelumnya berjudul 'Mutasi 11 Perwira di Polres Sleman', yang betul adalah 'Mutasi 11 Perwira di Polres Kebumen'. (Suk)-f

## Dua Siswa Tenggelam di Sungai Serayu

**CILACAP (KR)** - Dua anak warga Dusun Jembre Desa Paketingan Kecamatan Sampang, Cilacap ditemukan tewas, setelah beberapa jam dilaporkan hilang hanyut di Sungai Serayu masuk wilayah Dusun Karanganyar Desa Karang Tengah Kecamatan Sampang. Kedua jenazah korban telah dimakamkan keluarganya setelah divisum tim Puskesmas Sampang, Sabtu (29/8). Kedua korban tewas terdiri Saerobi Mukti (13) siswa SMP warga Jalan Ullamsari RT 02/05 Dusun Jembre Desa Paketingan Kecamatan Sampang, dan Fikri Bagus Satrio (13) siswa SMP warga Jalan Merdeka RT 02/04 Paketingan, Sampang. Jumat (28/8) sore, kedua korban bersama tiga temannya bermain ke Sungai Serayu sekitar Dusun Karanganyar Desa Karang Tengah, Sampang. Mereka tertarik bermain sungai karena pada musim kemarau kondisi aliran Sungai Serayu dangkal dan ada sebagian dasar sungainya yang terlihat.

Ketika sampai di Sungai Serayu kelima anak tersebut berupaya bermain air. Awalnya korban Saerobi yang terjun ke aliran Sungai Serayu. Diperkirakan karena lokasi terjun itu merupakan perairan yang masih dalam, sehingga korban Saerobi langsung menghilang. Kondisi itu membuat teman-teman korban panik, sehingga korban Fikri berinisiatif berupaya menolong korban Saerobi dengan terjun pula ke perairan tersebut. Namun naas, korban Fikri ikut terhanyut pula dan menghilang. (Mak)-f

## Pemerintah Akan Angkat Satu Juta Guru Baru

**SOLO (KR)** - Pemerintah memastikan akan melakukan pengadaan 1 juta guru, sekitar 200 ribuan perawat, bidan, dan dokter, selain pula tenaga penyuluh bidang pertanian, Keluarga Berencana (KB), dan pendidikan pada tahun anggaran 2021 mendatang. Pengadaan guru, tenaga kesehatan dan penyuluh lapangan tersebut, menjadi skala prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, saat peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman di Solo, Jumat (28/8), mengungkapkan, semula pemerintah memang meniadakan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara

(CASN) baru pada tahun 2021, sebab akan lebih fokus pada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Namun belakangan disepakati untuk pengadaan 1 juta guru, 200 ribuan tenaga kesehatan serta penyuluh lapangan.

Hingga saat ini, pihaknya masih terus melakukan reformasi birokrasi dengan mengedepankan kualitas dan integrasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam kaitan itu, sudah banyak ASN yang melanggar disiplin dikekan sanksi tegas, mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan.

Jika seorang ASN diketahui terlibat dalam kegiatan radikalisme, dipastikan akan dikenai sanksi non-job, dan jika yang

bersangkutan keberatan langsung dipecat. Demikian halnya ASN yang terlibat kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar, sanksi yang dijatuhkan berupa pemecatan. Selain itu, pengawasan juga diperketat pada unit-unit kerja yang rawan terjadi tindak pidana korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, dana hibah, dan sebagainya.

Sanksi tegas, ujar Tjahjo, juga dilakukan kepada ASN yang melakukan poligami ataupun poliandri. Sudah banyak ASN dijatuhi sanksi karena melakukan poligami, dan yang belakangan ini mulai muncul tren baru adalah poliandri. Seorang ASN memungkinkan melakukan poligami ataupun poliandri, sepanjang memperoleh izin dari pasangan pertama serta dari atasan.

Di sisi lain, menyinggung



KR - Hari D Utomo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tjahjo Kumolo meninjau layanan di MPP Jenderal Sudirman yang baru diresmikan.

keberadaan MPP di Solo, Tjahjo mengapresiasi bahkan berharap memicu daerah lain untuk membangun hal sama guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat. MPP Jenderal Sudirman Solo sendiri, saat ini melayani 377 jenis layanan publik yang diampu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo maupun instansi vertikal, seeperti Kepolisian, Imigrasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain. (Hut)-f

## KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA

# Berkas Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

**SUKOHARJO (KR)** - Polres Sukoharjo kebut berkas kasus pembunuhan satu keluarga warga Dukuh Slemben RT 01 RW 05, Desa Duwet, Kecamatan Baki. Berkas akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo setelah dinyatakan lengkap atau P21.

Pemberkasan dikebut mengingat kejadian menewaskan empat orang terdiri dari suami, istri dan dua orang anak menyita perhatian publik.

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Nanung Nugroho, Sabtu (29/8), mengatakan, proses pemberkasan kasus pembunuhan satu keluarga di Slemben, Duwet, Baki memang dikebut penyidik. Sebab kasus tersebut besar dan menjadi perhatian masyarakat. Di sisi lain, Polres Sukoharjo sejak awal juga sudah bergerak cepat setelah menerima laporan warga ada pembunuhan dan tiga jam kemudian berhasil menangkap pelaku.

"Berkas kasus pembunuhan Slemben, Duwet, Baki segera diselesaikan, proses dikebut mulai dari awal olah tempat kejadian perkara

(TKP), dan tiga jam kemudian menangkap pelaku, pemeriksaan saksi dan rekonstruksi, ujarnya. Nanung Nugroho mengatakan sekarang penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas perkara.

Di sisi lain juga melihat secara keseluruhan kelengkapan. Apabila nanti sudah lengkap atau P21 maka segera dilimpahkan ke Kejari Sukoharjo. Setelah berkas dilimpahkan ke Kejari harapannya proses hukum segera berlanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo.

Sebelumnya, Polres Sukoharjo menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga warga Dukuh Slemben RT 01 RW 05, Desa Duwet,

Kecamatan Baki di halaman Mapolres Sukoharjo, Kamis (27/8). Rekonstruksi dilakukan setelah polisi memastikan pelaku pembunuhan tunggal HT (41) warga Kecamatan Baki. Total ada 51 adegan dipergakan pelaku disaksikan penyidik dan pihak terkait.

Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan rekonstruksi dilakukan Polres Sukoharjo di halaman Mapolres Sukoharjo demi keamanan. Sebab rencana semula rekonstruksi akan digelar di rumah korban atau tempat kejadian perkara. Rekonstruksi dilakukan terhadap kasus pembunuhan satu keluarga warga Dukuh Slemben RT 01 RW 05, Desa Duwet, Kecamatan Baki dengan korban empat orang terdiri dari suami, isteri dan dua orang anak.

Keempat korban yakni, Suranto (43), Sri Handayani (36), Rafael Refalino (10) dan Dinar Alvin (6). Sedangkan pelaku tunggal yakni HT. Korban merupakan pengusaha rental

mobil memiliki hubungan kedekatan dengan pelaku. Sebab Suranto dan HT merupakan teman sekolah. Selain itu HT juga sopir dari rental mobil yang dimiliki korban. "Rekonstruksi kasus pembunuhan Duwet, Baki ini dilakukan untuk melengkapi pemberkasan. Rekonstruksi digelar di halaman Mapolres Sukoharjo karena alasan keamanan dan dijaga ketat anggota, ujarnya.

Kapolres menjelaskan, dalam pemeriksaan total ada 51 adegan dilakukan pelaku saat membunuh korban. Penyidik kemudian melakukan rekonstruksi untuk melihat secara langsung adegan dari pelaku. "Pelaku sudah memiliki niat membunuh korban karena kepepet membayar hutang yang sudah jatuh tempo pada hari kejadian itu juga, lanjutnya. Dari hasil pemeriksaan kondisi kesehatan pelaku saat kejadian dalam keadaan sehat. Selain itu hasil visum menunjukkan korban mengalami luka tusukan pisau dapur antara dua hingga tujuh tusukan. (Mam)-f

## Penambang Pasir Tolak Larangan Penggunaan Mesin Mekanik

**BANYUMAS (KR)** - Sejumlah penambang pasir rakyat di sepanjang Sungai Serayu seperti di Desa Patikraja, Wlahar, Suro, dan Srowot, Kabupaten Banyuwangi menolak imbauan dari Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) Yogyakarta, yang meminta penambang tidak menggunakan mesin mekanik. Permintaan BBWSO agar penambang rakyat tidak menggunakan mesin mekanik, disampaikan dalam forum sosialisasi kordinasi pengawasan pemantauan dan penertiban bidang sumber daya air di Kantor Balai Dinas ESDM Wilayah Banyumas.

Elko, salah satu penambang rakyat di Patikraja, Jumat (28/8) menjelaskan, penambangan pasir rakyat yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

"Sesuai pasal 48 ayat 4, PP Nomor 23 Tahun 2010, pada Bab 3, huruf A, dan B menjelaskan, sesuai Ijin Penambangan Rakyat (IPR) ijin pertambangan paling dalam 25 meter. Kemudian menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga Mak 25 Horse Power," ungkapnya.

Sedang penjelasan dari BBWSO tentang pelarangan penggunaan mesin mekanik hanya boleh di khususkan

untuk logam. Padahal sesuai PP Nomor 23 Tahun 2010, dibuat untuk tata cara pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara bukan hanya tambang logam. Penjelasan pasal tersebut adalah untuk izin pertambangan rakyat secara umum tidak ada penyebutan khusus untuk tambang logam seperti yang dikehendaki oleh BBWSO. "Artinya kegiatan yang kami lakukan sudah sesuai aturan penggunaan mesinnya, jika saat ini BBWSO hendak melarang artinya tidak berdasar," jelas Elko.

Ketua Forum Rembug Masyarakat Pengelolaan Sumberdaya Air Serayu Hilir, Eddy Wahono para penambang disulitkan dengan tumpang tindih aturan. Menurutnya tumpang tindih peraturan ini menyebabkan pemerintah juga melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat sendiri.

Dijelaskan selama ini rakyat hanya dijadikan objek kebijakan, seharusnya rakyat diberi ruang yang jelas, sehingga bisa menjalankan usaha secara benar, tanpa harus dikorbankan oleh tumpang tindih aturan tersebut. (Dri)-f



KR-Driyanto

Penambangan pasir rakyat di Sungai Serayu.

## DORONG INOVASI LAYANAN PUBLIK Menpan RB Kunjungi Kantor Imigrasi Surakarta

**KARANGANYAR (KR)** - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong Kantor Imigrasi memberikan pelayanan publik terbaik dan berinovasi. Termasuk memberi ketegasan permasalahan imigrasi bagi WNI maupun WNA.

"Kami harapkan fokus ke layanan skala prioritas. Bagaimana layanannya warga asing saat pandemi, jangan sampai ada keluhan. Juga terkait izin tinggal. Bagaimana pengelolaan aduan masyarakat itu yang harus ditekankan. Visi misi pak presiden itu tentang keseriusan mengerjakan skala prioritas di reformasi birokrasi. Beliau ingin peningkatan layanan masyarakat terbuka, efektif dan efisien. Kalau bisa diselesaikan per menit ya per menit. Kalau per hari ya per hari. Harus ada kepastian. Misalnya, apakah memungkinkan pembuatan paspor sehari," kata Tjahjo dalam sambutannya.

Instansi tersebut juga didorong berinovasi untuk memangkas rantai birokrasi dalam menyelesaikan zona integrasi. Bersama rombongan, Tjahjo meninjau berbagai layanan publik yang berada di Kanim Klas 1 A TPI Surakarta, antara lain pelayanan bagi kaum disabilitas, pembuatan paspor, dan fasilitas ruang laktasi. Dalam agenda di Soloraya, rombongan juga mengunjungi sejumlah kantor pelayanan publik. Ia menyebut layanan pembuatan STNK di Satlantas idealnya bisa selesai dalam hitungan menit. Begitu pula penerbitan surat kelakuan baik di kantor polisi. Bagi pasien RSUD maupun RS swasta, kualitas pelayanan juga diminta prima. "Misalnya membuat loket layanan satu atap. Untuk mengurus sesuatu cukup di satu tempat yang melayani formulir yang dibutuhkan. Perpendek rantai birokrasi dan percepat pelayanan," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi mengatakan pihaknya berusaha memberi layanan maksimal. Di lembaga pemasyarakatan, sempat mengurangi jumlah warga binaan melalui asimilasi. (Lim)-f

## Alokasi DBHCHT Dukong Program JKN

**WONOSOBO (KR)** - Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2020 untuk Kabupaten Wonosobo mencapai Rp 13 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 53,07% dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sisanya 46,93% untuk kegiatan non JKN.

"Alokasi DBHCHT Wonosobo sepenuhnya digu-

nakan untuk mendanai program atau kegiatan, antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal," ungkap Sekda Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo, Jumat (28/8).

Perlu diketahui, bahwa Wonosobo bukan merupakan kabupaten penghasil cukai tembakau. Namun



KR-Ariswanto

One Andang Wardoyo

demikian perlu juga sosialisasi terkait penggunaan

cukai ilegal pada barang-barang kena cukai. Melalui adanya sosialisasi ketentuan di bidang cukai, diharapkan bisa mensinergikan dan memberikan informasi kepada perangkat daerah pengampu DBHCHT dan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk itu, pihak-pihak terkait agar memahami

dan memperhatikan dengan seksama aturan perundangan yang berlaku tentang cukai. "Tujuannya, tentu agar dalam pelaksanaan di lapangan, baik perencanaan program kegiatan dan penganggaran perangkat daerah tepat sasaran, sehingga dapat mendukung visi misi Bupati Wonosobo, utamanya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah," pungkasnya. (Art)-f